



PENGADAAN DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN: STUDI IMPLEMENTASI E-KATALOG V6 PADA PEMERINTAH DAERAH

Difa Ramayanti

*Korespondensi :

Email :

difaramayanti04@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 11 September 2025

Revisi : 17 November 2025

Diterima : 14 Desember 2025

Diterbitkan : 23 Desember 2025

Kata Kunci :

Tata Kelola Digital; Reformasi
Pengadaan; Kapasitas
Kelembagaan

Keyword :

Digital Governance; Procurement
Reform; Institutional Capacity

Abstrak

Agenda transformasi digital pengadaan pemerintah diarahkan untuk memperkuat efektivitas layanan, akuntabilitas institusional, dan transparansi tata kelola publik. Dalam kerangka tersebut, e-Katalog Versi 6 (V6) diperkenalkan sebagai pembaruan sistem yang dirancang untuk menyempurnakan proses pengadaan berbasis elektronik. Pada tingkat pemerintah daerah, implementasi sistem ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan kebijakan dan operasional, khususnya yang berkaitan dengan kecepatan verifikasi penyedia, kesiapan fitur sistem, serta kemudahan pemanfaatan oleh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Katalog V6 pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Wali Kota Bukittinggi serta menilai kapasitas kebijakan digital tersebut dalam merespons keterbatasan yang muncul pada versi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparatur LPSE, serta telaah dokumen kebijakan dan prosedur pengadaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Katalog V6 memperkuat kinerja layanan pengadaan, mempercepat mekanisme aktivasi penyedia, dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan regulasi pengadaan. Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh tantangan implementatif, terutama kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta kesenjangan literasi digital di kalangan sebagian penyedia. Studi ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan pengadaan digital yang tidak hanya berfokus pada pembaruan sistem, tetapi juga mengintegrasikan strategi pengembangan kapasitas institusional, pendampingan penyedia, dan desain kebijakan adaptif untuk memastikan keberlanjutan reformasi pengadaan di tingkat pemerintah daerah.

The digital transformation agenda in public procurement is intended to strengthen service effectiveness, institutional accountability, and transparency in public governance. Within this framework, e-Catalog Version 6 (V6) was introduced as a system upgrade aimed at refining electronic procurement processes. At the local government level, the implementation of this system continues to encounter a range of policy and operational challenges, particularly those related to the speed of supplier verification, system feature readiness, and ease of use for key stakeholders. This study aims to examine the implementation of e-Catalog V6 within the Electronic Procurement Service (LPSE) of the Bukittinggi City Mayor's Office and to assess the capacity of this digital policy instrument to address limitations identified in earlier system versions. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation, in-depth interviews with LPSE officials, and a review of relevant procurement policy documents and procedures. The findings indicate that the adoption of e-Catalog V6 has strengthened procurement service performance, accelerated supplier activation mechanisms, and enhanced the consistency of regulatory implementation. At the same time,

the effectiveness of this policy remains shaped by implementation-level challenges, particularly the need for sustained capacity-building initiatives and persistent gaps in digital literacy among certain suppliers. This study underscores the importance of formulating digital procurement policies that extend beyond system modernization by embedding institutional capacity development, targeted supplier assistance, and adaptive policy design to ensure the long-term sustainability of procurement reforms at the local government level.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi agenda utama reformasi sektor publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu area yang mengalami perubahan signifikan adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengingat besarnya porsi belanja publik dalam struktur anggaran negara dan daerah (Bandiera et al., 2009). Di tingkat pemerintah daerah, belanja pengadaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai pengungkit aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, praktik pengadaan konvensional selama ini sering dihadapkan pada persoalan inefisiensi, rendahnya transparansi, biaya transaksi yang tinggi, serta keterbatasan akses pelaku usaha lokal terhadap pasar pengadaan pemerintah (Jajang, 2021). Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem pengadaan elektronik sebagai bagian dari agenda transformasi digital dan perbaikan tata kelola ekonomi publik (Margetts & Dunleavy, 2013).

Pengembangan katalog elektronik (e-Katalog) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu instrumen utama dalam reformasi pengadaan tersebut (Nasution, 2020; Rakhman, 2024). Peluncuran e-Katalog Versi 6 (V6) menandai fase baru digitalisasi pengadaan dengan menghadirkan fitur yang lebih terintegrasi, seperti koneksi langsung dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah (SIPD), sistem aplikasi keuangan instansi (SAKTI), pembayaran digital, serta mekanisme pemantauan dan audit transaksi secara real-time (Mustari et al., 2022). Dari perspektif ekonomi publik, integrasi sistem ini diharapkan mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas fiskal (Mahri et al., 2021). Selain itu, e-Katalog V6 juga dirancang untuk memperluas partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah dengan menyediakan akses pasar yang lebih terbuka dan terstandarisasi (Yunus & Anwar, 2021).

Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan e-procurement dan e-Katalog berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Mardjono et al., 2022). Penelitian juga menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan berpotensi mengurangi ruang praktik koruptif karena seluruh proses terekam secara elektronik dan dapat diaudit. Meski demikian, sebagian besar kajian yang ada

masih berfokus pada level nasional atau menekankan aspek normatif dan kepatuhan regulasi. Bukti empiris yang menggambarkan bagaimana e-Katalog V6 diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam konteks integrasi sistem ekonomi dan dinamika UMKM lokal, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik daerah, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia sering kali menentukan keberhasilan kebijakan digital di lapangan (Yunus & Anwar, 2021).

Kota Bukittinggi sebagai daerah dengan struktur ekonomi berbasis perdagangan dan pariwisata merupakan konteks empiris yang menarik untuk mengkaji implementasi e-Katalog V6. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa di daerah ini bersifat dinamis, sementara keberadaan UMKM lokal menjadi elemen penting dalam rantai pasok ekonomi daerah. Implementasi e-Katalog V6 di LPSE Kantor Wali Kota Bukittinggi membuka ruang untuk menilai sejauh mana integrasi sistem pengadaan digital mampu memperkuat efisiensi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Di sisi lain, berbagai tantangan seperti literasi digital UMKM, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah berpotensi memengaruhi efektivitas sistem tersebut.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Katalog V6 di LPSE Kantor Wali Kota Bukittinggi dengan menekankan aspek integrasi sistem ekonomi pengadaan daerah. Artikel ini berupaya mengisi celah literatur dengan menyajikan bukti empiris mengenai bagaimana digitalisasi pengadaan bekerja pada level lokal, serta faktor-faktor yang memediasi hubungan antara penerapan sistem e-Katalog V6 dan peningkatan kinerja ekonomi publik daerah. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan literatur ekonomi publik dan tata kelola digital, tetapi juga sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengadaan berbasis digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi e-Katalog Versi 6 (V6) dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan fokus pada integrasi sistem ekonomi dan tata kelola pengadaan di tingkat lokal (Ibrahim, 2023). Pendekatan ini dipilih karena implementasi e-Katalog V6 tidak hanya merupakan perubahan teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika kelembagaan, koordinasi antarsistem, dan adaptasi aktor ekonomi lokal, khususnya UMKM (Dewi et al., 2023). Selain itu, kajian empiris di tingkat pemerintah daerah masih terbatas, sehingga diperlukan analisis kontekstual untuk memahami bagaimana kebijakan pengadaan digital bekerja dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses, mekanisme, dan kendala implementasi e-Katalog

V6. Unit analisis penelitian adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kantor Wali Kota Bukittinggi sebagai institusi pengelola sistem, termasuk proses pengadaan yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) serta interaksi dengan penyedia barang dan jasa. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan staf LPSE dan aparatur terkait, serta observasi langsung terhadap proses administrasi dan penggunaan sistem e-Katalog V6 (Putri, 2020). Data sekunder dikumpulkan melalui desk-review terhadap dokumen resmi pemerintah daerah, peraturan pengadaan barang dan jasa, pedoman teknis e-Katalog V6, serta laporan dan publikasi kebijakan dari LKPP. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan pedoman wawancara terbuka, dan studi dokumentasi untuk memverifikasi temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengodean, pengelompokan tema, dan interpretasi dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka integrasi sistem ekonomi dan literatur ekonomi publik.

Hasil dan Pembahasan

Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Katalog Versi 6 (V6) di LPSE Kantor Wali Kota Bukittinggi secara nyata memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf LPSE, e-Katalog V6 diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang bersifat wajib, bukan sekadar alternatif sistem pengadaan. Seorang informan menyatakan bahwa hampir seluruh proses pengadaan kini diarahkan untuk menggunakan e-Katalog, kecuali pada kondisi tertentu yang diatur secara khusus (Iqbal, 2020). Temuan ini diperkuat oleh dokumen internal LPSE yang menunjukkan penyesuaian prosedur operasional pengadaan agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh LKPP (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Penguatan regulasi tersebut tercermin dalam meningkatnya standardisasi proses pengadaan. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi penyedia, pemilihan produk, hingga transaksi pembayaran, harus mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh sistem. Kondisi ini membatasi ruang diskresi individual dan mendorong kepatuhan aparatur terhadap aturan formal. Selain itu, sistem e-Katalog V6 juga mempermudah proses audit karena seluruh aktivitas transaksi terekam secara digital dan dapat ditelusuri dengan lebih cepat. Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dalam menerapkan regulasi digital ini masih bervariasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa OPD telah mengadopsi prosedur digital secara konsisten, sementara OPD lain

masih memerlukan adaptasi, terutama ketika menghadapi kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia (Sun'an, 2015).

Integrasi Sistem dan Efisiensi Proses Pengadaan

Data wawancara mengungkapkan bahwa integrasi e-Katalog V6 dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dipandang sebagai salah satu perubahan paling signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Informan menyampaikan bahwa proses pengadaan menjadi lebih ringkas karena data anggaran, transaksi, dan pembayaran dapat terhubung secara langsung tanpa harus dilakukan penginputan ulang ke dalam sistem yang berbeda.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengadaan kini dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk pemilihan produk, pencatatan kontrak, dan pelaporan keuangan. Standarisasi format data dalam e-Katalog V6 membantu mengurangi kesalahan administrasi, karena sistem secara otomatis melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan (Taufik et al., 2023). Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi sistem belum sepenuhnya berjalan secara *end-to-end*. Pada beberapa OPD, koordinasi internal masih dilakukan secara manual, khususnya pada tahap perencanaan dan komunikasi antarpihak. Hal ini menyebabkan efisiensi yang dihasilkan oleh sistem belum dirasakan secara merata di seluruh unit kerja. Dengan demikian, meskipun e-Katalog V6 telah meningkatkan efisiensi administratif, manfaatnya masih bergantung pada kesiapan internal masing-masing OPD.

Partisipasi UMKM dan Tantangan Implementasi Sistem Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa e-Katalog V6 membuka peluang yang lebih luas bagi penyedia lokal untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah daerah. Sistem katalog elektronik memungkinkan UMKM memasarkan produk mereka secara langsung kepada pemerintah tanpa harus melalui prosedur pengadaan konvensional yang kompleks. Namun, data juga menunjukkan bahwa peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha lokal.

Kesulitan utama yang dihadapi UMKM berkaitan dengan rendahnya literasi digital, terutama dalam proses registrasi akun, pengunggahan produk, dan pengelolaan transaksi. Dokumen LPSE menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar dalam e-Katalog V6, tetapi tingkat transaksi aktif masih didominasi oleh penyedia yang telah berpengalaman (Kurniawati et al., 2021; Rais et al., 2023). Observasi lapangan juga mengindikasikan bahwa sebagian UMKM masih bergantung pada pendampingan dari aparaturnya pemerintah untuk dapat mengoperasikan sistem. Selain literasi digital, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan turut menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi UMKM. Temuan ini menunjukkan

bahwa keberhasilan e-Katalog V6 dalam mendorong keterlibatan UMKM sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan teknis dan pendampingan yang memadai (Fadlurahman et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-Katalog Versi 6 (V6) di LPSE Kantor Wali Kota Bukittinggi secara substantif memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah melalui peningkatan standardisasi prosedur, transparansi proses, dan akuntabilitas fiskal. Pemosisian e-Katalog V6 sebagai instrumen kebijakan yang bersifat wajib mendorong kepatuhan regulatif aparatur serta memperkuat mekanisme pengawasan pengadaan berbasis pencatatan transaksi digital. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan tidak hanya merepresentasikan pembaruan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi kelembagaan dalam pengelolaan belanja publik di tingkat lokal.

Dari perspektif efisiensi ekonomi publik, integrasi e-Katalog V6 dengan sistem perencanaan dan keuangan daerah seperti SIPD dan SAKTI berkontribusi pada penyederhanaan proses administrasi dan pengurangan biaya transaksi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa manfaat integrasi sistem belum sepenuhnya terdistribusi secara merata antarorganisasi perangkat daerah akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan internal. Selain itu, meskipun e-Katalog V6 membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM lokal, rendahnya literasi digital dan keterbatasan pendampingan berkelanjutan masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada satu pemerintah daerah membatasi generalisasi temuan ke konteks daerah lain dengan karakteristik kelembagaan dan struktur ekonomi yang berbeda. Kedua, analisis belum mengukur secara kuantitatif dampak e-Katalog V6 terhadap indikator kinerja ekonomi publik, seperti efisiensi belanja, penurunan biaya transaksi, atau peningkatan kinerja UMKM, serta belum menangkap dinamika dampak kebijakan dalam jangka menengah dan panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif lintas daerah dan menggabungkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna menguji hubungan kausal antara digitalisasi pengadaan dan kinerja ekonomi publik. Selain itu, riset mendatang perlu mengeksplorasi peran kebijakan komplementer seperti penguatan literasi digital, pendampingan UMKM, dan pembangunan kapasitas institusional untuk memahami bagaimana kombinasi instrumen kebijakan dapat memaksimalkan manfaat pengadaan digital secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiera, O., Prat, A., & Valletti, T. (2009). Active and passive waste in government spending. *American Economic Review*, 99(4), 1278–1308. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1278>
- BPS. (2025). *Bukittinggi dalam angka 2025*.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Fadlurahman, F. G., Fitria, I. J., Digital, U. T., Sumber, K., & Manusia, D. (2024). Analisis Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pada Rumah Bumn Bandung. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(7), 208–216.
- Hakim, A. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 217–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77–97.
- Jajang, W. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 05(01), 23–30.
- Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. (2021). Ekonomi pembangunan islam. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research; Publisher: Atlantis Press*, 1(1), Juni.
- Mardjono, R., Narindro, L., Qamar, A. S., Sari, S., Maulana, A., & Jubaidah, I. (2022). Pemberdayaan UMKM Komunitas OK OCE Menggunakan Media Digital. *Abdimas Universal*, 4(1), 49–58.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987). <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Mustari, N., Suardi, W., & Syukri, U. (2022). Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 193–200.
- Nasution, J. (2020). *Ekonomi publik*. FEBI UIN-SU Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* Pemerintah Republik Indonesia, 22 Maret 2018, 1–90.
- Puteri, H. E., Arinda, N., Fonda, A., Hidayat, F., & Ridhah, H. (2024). Gen Z's Muslim Customer Decision in Online Shopping: Estimating The Effects of Business Ethics and Prices Consciousness. *ICEFS Proceeding*, 2, 53–64.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh Teknologi Digital,

- Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342–355.
- Rakhman, A. A. (2024). Analisis Pangsa Pasar dan Peluang Pengembangan Katalog Elektronik Pemerintah Versi 6 Dalam Era Transformasi E-Commerce Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 69–77.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media Penerbit.
- Taufik, M., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2023). Determinants and consequences of maqashid sharia performance: evidence from Islamic banks in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1426–1450. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0205>
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.

Copyright holder:
Difa Ramayantiet al (2025)

First publication right:
MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies

This article is licensed under:

